

PENGARUH BELANJA MODAL DAN WEALTH (KEMAKMURAN) TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nurizka Alya Audina ^{1*}, Bob Mustafa ², Agus Widodo ³

Politeknik Negeri Pontianak

*email penulis korespondensi: alyaaudina12@gmail.com

Abstract

Purpose – This research was conducted with the aim of: 1) Determine the effect of capital expenditure on regional financial independence of the Regency/City of West Kalimantan Province, 2) Determine the effect of wealth (prosperity) on regional financial independence of the Regency/City of West Kalimantan Province, and 3) Determine the effect of capital expenditure and wealth (prosperity) on regional financial independence of the Regency/City of West Kalimantan Province.

Method – The population in this study is all Regency/city governments in West Kalimantan Province, totaling 2 cities and 12 regencies. The sampling technique uses total sampling. Methods of data collection using the method of documentation and literature study. The data analysis used is panel data regression analysis.

Result – The results of the study reveal that T test for the capital expenditure variable, the prob value is obtained. $0.4562 > \alpha (0.05)$. This means that the large or small capital expenditure issued by the government does not affect regional financial independence. T test for the Wealth variable (prosperity), the prob value is obtained. $0.0000 < \alpha (0.05)$. This means that the better prosperity in the area, the higher the regional financial independence. F test for the Capital Expenditure Variable and Wealth (Prosperity), the prob value is obtained. $0.000000 < \alpha (0.05)$. This means that the increase in capital expenditure is in conjunction with an increase in wealth (prosperity) will affect the level of regional financial independence.

Implication – The implication of the study reveal that capital expenditure has no effect on Regency/City Regional Financial Independence in West Kalimantan Province, wealth/prosperity has an effect on Regency/City Regional Financial Independence in West Kalimantan Province, and capital expenditure & wealth/prosperity has an effect on Regency/City Regional Financial Independence in West Kalimantan Province.

Originality – This study uses different variables and subjects from previous studies.

Keywords: Capital Expenditures; Wealth (Prosperity); Regional Financial Independence; West Kalimantan Province.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya otonomi daerah bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, dimana seluruh kegiatan pembangunan tidak lagi terkonsentrasi pada satu daerah. Dengan harapan terwujudnya kemandirian keuangan daerah bagi daerah tersebut yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

Menurut Halim & Kusufi (2012) kemandirian keuangan daerah adalah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan terhadap masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Tujuan kemandirian keuangan daerah mencerminkan suatu bentuk pemerintahan daerah apakah sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum. Menurut Mahmudi (2019; 140) menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui perbandingan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer pusat/provinsi.

Menurut tata letak Geografis, Provinsi Kalimantan Barat dikenal sebagai provinsi terluas keempat di Indonesia. Salah satu karakteristik Kalimantan Barat yaitu termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, seperti negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Dengan letak yang sangat strategis ini, maka Kalimantan Barat merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar negeri. Potensi untuk menggali pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat sesungguhnya sangat besar.

Tabel 1. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 – 2021

No	Nama Kab/Kota	Tahun					Rata - Rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kota Pontianak	44.78 %	38.03 %	39.37 %	37.94 %	37.90 %	39.60 %
2	Kota Singkawang	19.27 %	18.25 %	23.01 %	24.51 %	25.98 %	22.20 %
3	Kabupaten Bengkayang	4.47 %	5.54 %	5.14 %	5.97 %	6.69 %	5.56 %
4	Kabupaten Kapuas Hulu	8.45 %	4.81 %	4.69 %	5.20 %	4.84 %	5.60 %
5	Kabupaten Kayong Utara	4.87 %	4.05 %	3.94 %	5.84 %	4.33 %	4.61 %
6	Kabupaten Ketapang	9.19 %	9.96 %	9.44 %	11.91 %	13.01 %	10.70 %
7	Kabupaten Kubu Raya	12.81 %	14.09 %	13.51 %	14.51 %	12.28 %	13.44 %
8	Kabupaten Landak	12.06 %	7.57 %	8.98 %	10.20 %	8.51 %	9.47 %
9	Kabupaten Melawi	7.12 %	5.02 %	3.90 %	4.32 %	5.53 %	5.18 %

10	Kabupaten Mempawah	8.15 %	8.17 %	9.60 %	11.67 %	10.94 %	9.70 %
11	Kabupaten Sambas	13.99 %	8.55 %	9.41 %	8.97 %	9.40 %	10.06 %
12	Kabupaten Sanggau	12.30 %	9.39 %	7.97 %	10.62 %	8.97 %	9.85 %
13	Kabupaten Sekadau	9.43 %	7.40 %	5.79 %	5.84 %	5.73 %	6.84 %
14	Kabupaten Sintang	6.47 %	14.41 %	10.00 %	8.12 %	10.18 %	9.83 %

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat memiliki rata-rata di bawah 50 % bahkan ada kabupaten yang memiliki rata-rata di bawah 25 %. Hal ini menandakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat berada dalam dua kategori, yaitu kategori rendah dan sangat rendah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masih banyak daerah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat belum mampu mewujudkan kemandirian keuangan daerah. (Suhanda, 2017), menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal. Semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan dari pihak eksternal, maka semakin rendah pula tingkat kemandirian keuangan daerah, dan sebaliknya. Sehingga kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat dapat dikatakan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan dari pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahannya karena belum mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Pandemi *Covid-19* selama tahun 2020 dan 2021 juga turut mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat, dimana pandemi ini memberi dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat setempat, terutama di bidang ekonomi. Sehubungan dengan penerapan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, diberlakukan pembatasan aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti lockdown antar wilayah dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pembatasan kegiatan yang semakin ketat juga berdampak pada melemahnya kegiatan perekonomian lainnya seperti aktivitas produksi dan jasa yang dihasilkan sehingga pendapatan seseorang mengalami penurunan dan memberikan dampak negatif pada retribusi daerah dan pajak daerah yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tentu saja hal ini membuat pendapatan daerah menjadi semakin rendah, khususnya PAD. Tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, kehadiran pandemi *Covid-19* juga berdampak pada Belanja Modal sehingga mengalami penurunan yang diakibatkan oleh besarnya alokasi pada belanja tak terduga untuk mengantisipasi adanya gelombang pandemi *Covid-19*.

Pemerintah sudah seharusnya lebih memaksimalkan kemampuan daerahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi. Salah satu instrumen dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah adalah dengan memaksimalkan pelaksanaan Belanja Modal di suatu daerah dan juga memanfaatkan karakteristik keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut.

Salah satu karakteristik keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari *wealth* atau tingkat kemakmuran suatu daerah.

Penelitian ini menggunakan variabel Belanja Modal dan *Wealth* (Kemakmuran) karena peneliti menganggap faktor ini paling mampu mendeskripsikan kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan maupun pelayanan pada masyarakat. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada daerah dalam mengatur anggaran belanja daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang didalamnya termasuk Belanja Modal. Belanja modal merupakan salah satu jenis belanja langsung digunakan untuk membangun infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah diharapkan dapat semakin meningkatkan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya dalam menggali sumber daya keuangan khususnya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah karakteristik keuangan pemerintah yang salah satunya adalah *wealth* (kemakmuran). *Wealth* atau yang dapat disebut juga kekayaan atau kemakmuran merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah (Kusuma & Handayani, 2017). (Todaro, 2000) menyatakan bahwa pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran suatu daerah. Pendapatan perkapita dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita, semakin tinggi PDRB suatu daerah, semakin besar potensi pendapatan daerah tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah masih memberikan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Malau & Parapat (2020) tentang pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian Handayani & Erinosa (2020) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kedua penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Riyadi (2022) yang menunjukkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Selain penelitian terkait pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah, terdapat juga penelitian mengenai *wealth* (kemakmuran) terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Millenia (2022) menyatakan bahwa *wealth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian Karno & Alliyah (2021) menunjukkan bahwa *wealth* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah. Kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Novindriastuti & Purnomowati (2020) menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan hasil kajian tersebut maka penelitian ini sangat menarik untuk dikaji kembali sehingga dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan pemerintah daerah, khususnya dalam mengelola semua potensi sumber penerimaan daerah yang ada. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat dengan 14 kabupaten/kota yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian, data yang digunakan adalah data sekunder berupa data panel. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku (Kab/Kota) dan data jumlah penduduk kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan barat yang berjumlah 2 Kota dan 12 Kabupaten. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan studi pustaka.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Pada penelitian ini terdapat variabel dependen (terikat) yaitu Kemandirian Keuangan Daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Pengukuran kemandirian keuangan daerah menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu :

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Variabel Independen

Penelitian ini menggunakan Belanja Modal dan *Wealth* (Kemakmuran) sebagai variabel independen (bebas) dalam penelitian ini.

Variabel independen pertama yaitu belanja modal. Belanja Modal merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja asset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan berguna untuk menunjang kegiatan pemerintah. Pengukuran belanja modal yaitu:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Realisasi Belanja Modal}$$

Variabel independen kedua yaitu *wealth* atau kemakmuran. *Wealth* (Kemakmuran) merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pada penelitian ini *wealth* (kemakmuran) dilihat dari PDRB perkapita daerah tersebut, dikarenakan besarnya pendapatan perkapita lebih spesifik dalam menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB perkapita diukur dengan:

$$PDRB \text{ Perkapita} = \frac{\text{Nilai PDRB atas harga berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik yaitu metode regresi data panel dengan menggunakan *E-views 12* sebagai alat dalam menganalisis data.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2018; 19).

Analisis Model Estimasi Regresi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain (Napitupulu, et al., 2021; 117):

a. Common Effect Model

Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data wilayah/daerah sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *OLS (Ordinary Least Square)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

b. Fixed Effect Model

Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama).

c. Random Effect Model

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model yang paling tepat yaitu uji chow, uji hausman, uji lagrange-multiplier (Napitupulu, et al., 2021).

a. Uji Chow

Uji *chow* dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Untuk nilai statistic F hitung apabila nilai probabilitas *F-statistic* lebih kecil dari tingkat signifikan 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*, sedangkan apabila nilai probabilitas *F-probabilitas F-statistik* lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0.05) maka model yang digunakan adalah *Pooled Least Square (PLS) / Common Effect Model (CEM)*.

b. Uji Hausman

Uji *hausman* dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Untuk statistiknya uji hausman mengikuti distribusi statistic *chi-square* di mana apabila nilai probabilitas *chi-Square statistic* lebih kecil dari tingkat signifikan 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*, namun apabila nilai probabilitas *chi-Square statistic* lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0,05) maka model panel yang digunakan adalah *Random Effect Model*.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange-Multiplier* (LM) dilakukan untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect* digunakan *Lagrange Multiplier* (LM). Untuk statistiknya uji *lagrange-multiplier* menggunakan nilai *both Bruesh-pagan* di mana apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah *Random Effect Model*, namun apabila nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0,05) maka model panel yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran asumsi klasik. Asumsi-asumsi dasar mencakup (Napitupulu, et al., 2021; 66):

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas residual metode *Ordinary Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh *Jarque-Bera* (JB). Uji ini dengan melihat probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut (Napitupulu, et al., 2021). Apabila probabilitas $Obs \cdot R_2 > 0.05$ maka data berdistribusi normal, apabila probabilitas $Obs \cdot R_2 < 0.05$ maka data tidak berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemula adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Jika antar variabel independent ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0.90), maka hal ini merupakan indikasi multikolinearitas (Napitupulu, et al., 2021; 67). Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Napitupulu, et al., 2021; 66). Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini yaitu uji *Glesjser*. Apabila nilai signifikan antara variabel independent dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t - 1$) (Napitupulu, et al., 2021; 68). Pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Nilai *Durbin-Watson* dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif. Jika $dU < DW < (4-dL)$, berarti tidak terdapat autokorelasi.

Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel merupakan analisis regresi dengan struktur data yang merupakan data panel (Napitupulu, et al., 2021). Data panel adalah gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*. Model data panel yang menggabungkan data *time series* dengan data *cross section* menggunakan persamaan, sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + e$$

Keterangan:

- Y : Kemandirian Keuangan Daerah
 β_0 : Konstanta
 β_1 : Koefisien Regresi Belanja Modal
 β_2 : Koefisien Regresi *Wealth* (Kemakmuran)
 X_1 : Belanja Modal
 X_2 : *Wealth* (Kemakmuran)
e : Error
I : Kabupaten/Kota
t : Tahun

Uji Hipotesis

Menurut Ghozali (2018; 97), ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai *actual* dapat diukur dari *Goodness of hitnya*.

a. Pengujian Pengaruh Parsial (uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen pada tingkat signifikansi 0.05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan.

b. Pengujian Pengaruh Simultan (uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%).

c. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018; 97) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel – variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran suatu data yang ditinjau dari nilai *mean*, median, maximum, minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Gambaran statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Y	X ₁	X ₂
Mean	0.107039	2.97E+11	35305228
Median	0.081350	2.79E+11	33686653
Maximum	0.447800	6.96E+11	60568889
Minimum	0.015800	1.21E+11	18725082
Std. Dev.	0.088733	1.15E+11	9664648.
Observations	98	98	98

Sumber Data: Diolah E-views, 2023

Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

a. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model.

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	53.715161 220.78963	(13,82)	0.0000
Cross-section Chi-square	8	13	0.0000

Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas, *probability* pada *cross-section* F adalah 0.0000 menunjukkan bahwa angkanya lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat untuk digunakan.

b. Uji Hausman

Uji *Hausman* dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.374727	2	0.0681

Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa hasil uji *hausman* diperoleh dari *probabilitas chi-square* sebesar 0.0681 menunjukkan angka tersebut lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model (REM)* lebih tepat untuk digunakan.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier (LM)* untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* lebih baik dari *Common Effect Model* digunakan *Lagrange Multiplier (LM)*.

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange-Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	194.5267 (0.0000)	0.089324 (0.7650)	194.6161 (0.0000)

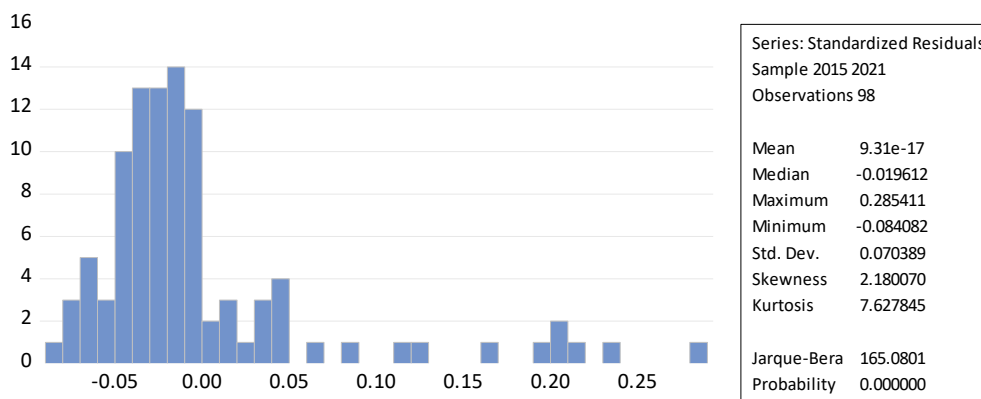
Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa hasil uji *lagrange-multiplier* diperoleh dari nilai *both Breusch-pagan* sebesar 0.0000 menunjukkan angka tersebut lebih kecil dari 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model (REM)* lebih tepat untuk digunakan.

Asumsi Klasik

a. Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, antara variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal.

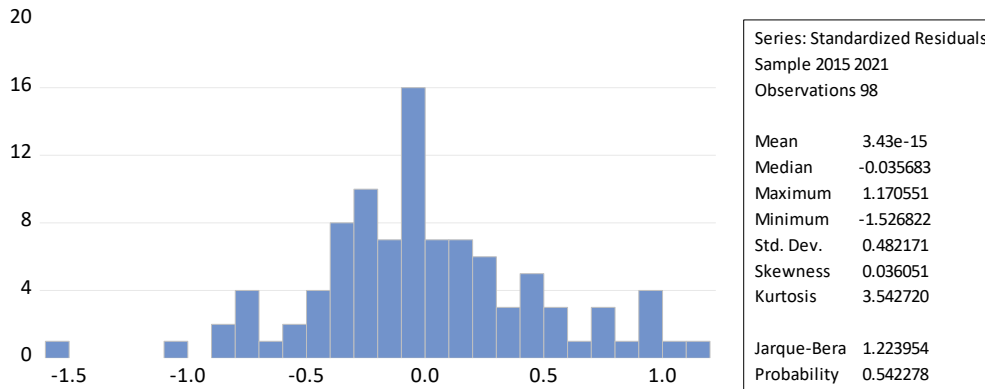


Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa data berdistribusi tidak normal. Data dikatakan tidak normal karena nilai probabilitas *Jarque-Bera (JB)* berada pada angka 0,000000 yang dimana lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 atau 5%. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data penelitian yang memiliki distribusi normal perlu dilakukan pengobatan atas ketidaknormalan data dengan cara transformasi data (Ghozali, 2018; 154). Pada penelitian ini melakukan transformasi data dengan bentuk *double-log* yaitu

merubah bentuk variabel dependen dan independent dalam bentuk *Logaritma Natural* (LN).



Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Data

Berdasarkan tabel uji normalitas setelah dilakukan transformasi data *Logaritma Natural* (LN) diperoleh nilai probabilitas JB sudah berada pada titik 0,542278 yang dimana telah melebihi nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 5%, yang artinya data pada penelitian sudah berdistribusi normal.

b. Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemula adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	Log (X ₁)	Log (X ₂)
Log (X ₁)	1.000000	0.268189
Log (X ₂)	0.268189	1.000000

Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Berdasarkan tabel 6 di atas hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel independent belanja modal dan *wealth* (kemakmuran) sebesar 0.268189 tidak lebih dari 0.90 yang artinya bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada model regresi.

c. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.749855	3.580557	-1.605855	0.1116
Log (X ₁)	0.062063	0.075245	0.824818	0.4115
Log (X ₂)	0.258079	0.151596	1.702420	0.0919

Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Berdasarkan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *Glejser* menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada setiap variabel independen berada pada angka di atas 0,05 atau 5%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

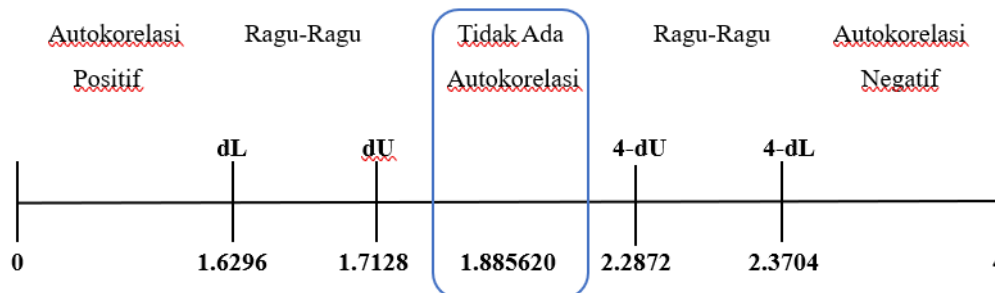
d. Autokorelasi

Tujuan pengujian autokorelasi pada model adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi pada periode sebelumnya atau terdapat variabel pengganggu ($t - 1$).

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson (DW)

Root MSE	0.216774	R-squared	0.308167
Mean dependent var	-0.448648	Adjusted R-squared	0.293602
S.D. dependent var	0.261959	S.E. of regression	0.220170
Sum squared resid	4.605108	F-statistic	21.15817
Durbin-Watson stat	1.885620	Prob (F-statistic)	0.000000

Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023



Grafik 1. Grafik Uji Tabel DW

Berdasarkan hasil perhitungan *Durbin-Watson*, posisi DW berada di antara dU dengan $4-dU$. Sehingga diperoleh persamaan dari rumus $dU < d < 4-dU$ terbentuk $1.7128 \leq 1.885620 \leq 2.2872$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model penelitian.

Analisis Regresi Data Panel

Setelah dilakukan berbagai tahap pengolahan data yang dimulai dari uji analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model dan uji asumsi klasik, maka tahap selanjutnya melakukan uji model persamaan regresi data panel.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-20.81431	4.548449	-4.576133	0.0000
Log_X1	-0.067852	0.090685	-0.748219	0.4562
Log_X2	1.161255	0.191213	6.073081	0.0000

Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Log}_Y = -20.81431 - 0.067852.X_1 + 1.161255.X_2$$

Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji parsial atau uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (independen) secara masing-masing (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 10. Hasil Uji t (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-20.81431	4.548449	-4.576133	0.0000
Log_X1	-0.067852	0.090685	-0.748219	0.4562
Log_X2	1.161255	0.191213	6.073081	0.0000

Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Berdasarkan tabel 10 hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai t sebesar -0.748219 dan nilai koefisien regresi sebesar -0.067852 dengan nilai *prob.* $0.4562 > \alpha$ (0.05). Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Berdasarkan hasil uji t diketahui nilai t sebesar 6.073081 dan nilai koefisien regresi sebesar 1.161255 dengan nilai *prob.* $0.0000 < \alpha$ (0.05). Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa *Wealth* (Kemakmuran) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

b. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel bebas (independent) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 11. Hasil Uji F (Simultan)

Root MSE	0.216774	R-squared	0.308167
Mean dependent var	-0.448648	Adjusted R-squared	0.293602
S.D. dependent var	0.261959	S.E. of regression	0.220170
Sum squared resid	4.605108	F-statistic	21.15817
Durbin-Watson stat	1.885620	Prob (F-statistic)	0.000000

Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F-Statistik sebesar 21.15817 dengan nilai probabilitas sebesar $0.000000 < \alpha$ ($0,05$). Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dan *Wealth* (Kemakmuran) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

c. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Besarnya nilai R^2 diantara nol dan satu ($0 < R < 1$). Jika nilainya mendekati angka satu, maka model tersebut baik.

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Root MSE	0.216774	R-squared	0.308167
Mean dependent var	-0.448648	Adjusted R-squared	0.293602
S.D. dependent var	0.261959	S.E. of regression	0.220170
Sum squared resid	4.605108	F-statistic	21.15817
Durbin-Watson stat	1.885620	Prob (F-statistic)	0.000000

Sumber Data: Diolah E-views 12, 2023

Nilai Adjusted R Square (R^2) pada tabel 12 sebesar 0,293602 yang berarti hanya sebesar 29.36% variabel independen yaitu Belanja Modal dan *Wealth* (Kemakmuran) mampu menjelaskan Kemandirian Keuangan Daerah, sedangkan sisanya 70.64% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Meningkatnya pengeluaran belanja modal yang dilakukan pemerintah tidak selalu diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah yang merupakan komponen dari kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut diduga karena terdapat kecenderungan penyerapan dan realisasi anggaran belanja modal yang rendah, jauh lebih rendah dari porsi pendanaan yang telah ditetapkan dalam APBD. Fenomena tersebut akan menyebabkan tertundanya pembangunan infrastruktur yang akan mengakselerasi kegiatan perekonomian, kemudian berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah karena rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja modal pemerintah daerah. Alokasi belanja modal yang tidak tepat sasaran adalah salah satu faktor penyebab daerah kurang produktif dalam penyaluran dananya. Dana yang dikeluarkan tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah tetapi justru menjadi beban pada dana alokasi umum, menjadikan pemerintah daerah menjadi ketergantungan terhadap pemerintah pusat (Apriana & Suryanto, 2010). Seperti pembelian tanah atau bangunan sebagai aset daerah, yang tidak dikelola dengan baik sehingga hanya menjadi aset terbengkalai. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat sudah mengusulkan kepada DPRD Kalimantan Barat untuk menjual sekitar 14 aset tak bergerak salah satunya Taman Budaya. Aset-aset tersebut diusulkan untuk dijual karena termasuk kategori aset yang dinilai kurang efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pandemi *Covid-19* selama tahun 2020 dan 2021 juga turut mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat, dimana pandemi ini memberi dampak yang luas bagi kehidupan masyarakat setempat, terutama di bidang ekonomi. Tidak hanya berdampak pada pendapatan daerah, kehadiran pandemi *Covid-19* juga berdampak pada Belanja Modal sehingga mengalami penurunan yang diakibatkan oleh besarnya alokasi pada belanja tak terduga untuk mengantisipasi adanya gelombang pandemi *Covid-19*.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novindriasturi dan Purnomowati (2020) bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Pengaruh *Wealth* (Kemakmuran) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *Wealth* (Kemakmuran) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Wealth* (Kemakmuran) sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang berjalan di daerah tersebut. Kemakmuran dalam penelitian ini direpresentasikan dengan PDRB perkapita, dimana salah satu nilai tambah PDRB perkapita berasal dari kombinasi faktor produksi (Novindriastuti & Purnomowati, 2020). PDRB yang tinggi menandakan bahwa kegiatan perekonomian daerah berjalan dengan baik, dengan begitu jumlah pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Banyaknya faktor produksi yang muncul akan mendatangkan pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi yang menjadi pemasukan bagi kas daerah. Pendapatan asli daerah yang tinggi akan membawa tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Millenia (2022) menunjukkan bahwa *wealth*/kemakmuran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian.

Pengaruh Belanja Modal dan *Wealth* (Kemakmuran) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Belanja Modal dan *Wealth* (Kemakmuran) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat memiliki tingkat realisasi belanja modal yang tinggi dan tingkat kemakmuran yang tinggi maka akan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Setiap kenaikan belanja modal dan *wealth* (kemakmuran) akan diikuti dengan kenaikan kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan nilai Adjusted R Square pada hasil uji koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai 0,293602 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal dan *wealth* (kemakmuran) berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah sebesar 29.36% dan sisanya 70.64% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Sehingga jika variabel belanja modal dan *wealth* (kemakmuran) dapat ditingkatkan secara bersama-sama maka tingkat kemandirian keuangan daerah akan lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Belanja Modal dan *Wealth* (Kemakmuran) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji t untuk variabel Belanja Modal, diperoleh nilai *prob.* $0.4562 > \alpha$ (0.05). Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Artinya besar atau kecilnya Belanja Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Hasil uji t untuk variabel *Wealth* (Kemakmuran), diperoleh nilai *prob.* $0.0000 < \alpha$ (0.05). Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa *Wealth* (Kemakmuran) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Artinya semakin baik kemakmuran di daerah tersebut maka semakin tinggi pula Kemandirian Keuangan Daerah.
3. Hasil uji F untuk variabel Belanja Modal dan *Wealth* (Kemakmuran), diperoleh nilai *prob.* $0.000000 < \alpha$ (0.05). Berdasarkan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal dan *Wealth* (Kemakmuran) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Artinya peningkatan realisasi belanja modal bersamaan dengan kenaikan *wealth* (kemakmuran) akan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel independen lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Serta mampu membandingkan antara kemandirian keuangan daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga dapat dilihat pemerataan dari kemandirian keuangan daerah.
2. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat sebaiknya mengarahkan Belanja Modal untuk membangun infrastruktur yang dapat mendorong peningkatan ekonomi sehingga dapat meningkatkan potensi pendapatan asli daerah.

BATASAN

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak menyimpang dari permasalahan pokok sehingga tujuan penelitian ini akan tercapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya menggunakan pengamatan dengan rentang waktu selama tujuh tahun yaitu 2015-2021.

REFERENSI

- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa - Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, Vol. 11. No. 1. pp: 68 - 79.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Tersedia di : <https://kalbar.bps.go.id/indicator/52/43/1/pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-kab-kota-.html> (Diakses pada 20 Mei 2023)
- Badan Pusat Statistik. (2023). Tersedia di : <https://kalbar.bps.go.id/indicator/12/42/1/jumlah-penduduk.html> (Diakses pada 5 Mei 2023)
- BPK RI Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (2023). E-PPID BPK RI. Tersedia di : <https://e-ppid.bpk.go.id> (Diakses pada 3 April 2023)
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah), Edisi Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, T. U., & Erinos. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *JEA : Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2. No. 1. pp: 2348 - 2361.
- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 - 2012. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3. No. 2. pp: 147 - 155.
- Karno, D. K., & Alliyah, S. (2021). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *iE : Jurnal Inspirasi Ekonomi*, Vol. 3. No. 1. pp: 40 - 55.
- Kusuma, A. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6. No. 1. pp : 404 - 420.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Malau, E. I., & Parapat, E. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal EK&BI*, Vol. 3. No. 2. pp: 332 - 337.
- Millenia, N. A. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 3. No. 6. pp: 786 - 803.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., M. Sirait, R. T., & Ria, C. E. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS (Edisi 1)*. Medan: MADENATERA.
- Novindriastuti, I., & Purnomowati, N. H. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (Studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014 - 2018). *Jurnal Mutiara Madani*, Vol. 8. No. 1. pp: 70 - 91.
- Olivier, B., & Johnson, D. R. (2012). *Macroeconomics*. New York: Pearson Education.
- Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. *Gambaran Umum Aspek Geografis Kalimantan Barat*. Tersedia di: <https://kalbarprov.go.id/page/geografis> (Diakses pada 25 Februari 2023).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02)
- Pontianakpos.jawapos.com. *14 Aset Pemprov Dijual, Bangun JK III*. Tersedia di : <https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/16/07/2020/14-aset-pemprov-dijual-bangun-jk-iii/> (Diakses pada 12 Juni 2023)
- Prasasti, D. (2006). Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita 30 Provinsi Di Indonesia Periode 1993 - 2003: Pendekatan Disparitas Regional dan Konvergensi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 21, No. 4, pp: 344 - 360.
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota



Di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi (JAKSI)*, Vol. 3 No. 1 pp: 298 - 314.

Sanusi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis (Cetakan Ketiga)*. Jakarta: Salemba Empat.

Saraswati, N. P., & Nurharjanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, Vol. 2. pp. 51 - 64.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhanda. (2017). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Andalas Lima Sisi.

Todaro, M. P. (2000). *Economic Development. Seventh Edition*. New York: Addition Wesley Longman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemeerintah Pusat dan Daerah